

PERILAKU POLITIK MASYARAKAT PESISIR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PULAU MARINGKIK, LOMBOK TIMUR

Nurun Sholeh¹⁾, Abdurrohman²⁾, Zulkarnain³⁾, Lalu M. Istiqlal⁴⁾

¹⁻⁴ Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi
Email: nurunsholeh13@gmail.com; armindo.dmk@gmail.com; zulkecerit1@gmail.com; istiqlalpraya@gmail.com

Artikel histori:

Submit: 29-05-2025

Revisi: 02-06-2025

Diterima: 28-06-2025

Terbit: 30-06-2025

Kata Kunci:

perilaku politik,
masyarakat Maringkik,
Pilkada Lombok Timur

Korespondensi:

armindo.dmk@gmail.com

Abstrak: *This study aims to inform the public about the political behavior of communities in remote areas, specifically the people of Maringkik Island. The main objective is to uncover the political behavior of the Maringkik Island community during the 2024 East Lombok Regional Head Election (Pilkada). This is a qualitative research using a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and document analysis. Data analysis was conducted through five stages: compiling & organizing data, disassembling, interpreting, concluding, and verifying. The findings reveal that in facing the 2024 East Lombok Pilkada, the people of Maringkik Island were more engaged in their daily routines as fishermen. They were largely unaffected by the political commotion surrounding the election. Although candidates and their campaign teams visited the island with promises of improving the residents' quality of life. Coastal residents of Maringkik Island hold the perception that local elections have never brought substantial or positive changes to their socio-economic conditions. This perception shapes a political behavior that tends to be passive and apolitical. Nevertheless, they still participate in the election, although their choices are often based on pragmatic and emotional considerations. Ultimately, the people of Maringkik Island prioritize social harmony and maintaining strong social bonds over political differences. This reflects a political orientation that values social cohesion more than active involvement in electoral politics.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) menjadi agenda politik yang sangat penting demi keberlangsungan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu pemilihan umum dalam negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam memilih wakilnya atau pemimpin yang ia percayai untuk duduk di kursi parlemen atau dalam struktur pemerintahan di pusat maupun daerah ((Sutarna et al., 2023). Kendati demikian, pemilu dimata sebagian rakyat tidak lebih dari sekedar sebuah diksi “kau yang berjanji kau yang mengingkari” karena lazimnya para politisi atau calon kepala daerah sering memberikan janji-janji politik kepada konstituennya pada masa kampanye. Indonesia yang sampai saat ini menganut demokrasi perwakilan mengidap penyakit *disconnected electoral* yaitu adanya keterputusan hubungan antara wakil (anggota parlemen) dengan yang diwakili (konstituen atau rakyat) sehingga seringkali kebijakan atau keputusan politik yang dihasilkan tidak selaras dengan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan dari orang yang diwakili tersebut (konstituen atau rakyat) (Hasimu & Amsir, 2020).

Di samping itu. Perlu diingat keberhasilan pemilihan umum sangat dipengaruhi oleh partisipasi politik dan perilaku politik masyarakat pemilih. Karena Perilaku Politik dan Partisipasi Politik merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan (Pusida et al., 2018). Istilah partisipasi politik mengacu pada perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik (Hasimu & Amsir, 2020). Partisipasi politik ini berkaitan dengan kegiatan politik pribadi individu dalam proses politik, seperti memberikan suara atau kegiatan politik lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi Keputusan kebijakan politik oleh pemerintah dalam rangka berpartisipasi dalam pemerintahan (Adila & Putra, 2020). Dalam hal ini partisipasi politik selalu berkaitan dengan demokrasi dan legitimasi. Karena partisipasi politik dalam sistem demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan (Arniti, 2020).

Pada titik ini, partisipasi politik bukan hanya sekedar angka statistik, tetapi juga mencerminkan adanya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung dan harapan mereka akan perubahan positif melalui pemilihan kepala daerah (Adila & Putra, 2020). Karena itu selain sebagai inti demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan dengan pemenuhan hak politik warga negara. (Arniti, 2020). Pada titik ini, untuk mengetahui sejauhmana partisipasi dan legitimasi warga negara terhadap berlangsungnya demokratisasi melalui pemilu di Indonesia salah satunya dapat dilihat melalui perilaku politik warga negara.

Sedangkan perilaku politik dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan pilihan-pilihan politik (Surbakti, 2018). 1992). Sedangkan (Mashuri et al., 2022) menjelaskan perilaku memilih atau voting behavior merupakan keputusan pemilih dalam menyalurkan hak pilih kepada kandidat, baik dalam kontestasi pemilu legislatif maupun eksekutif. Perilaku memilih diawali dari ketertarikan pemilih terhadap isu-isu yang berkembang dalam komunikasi politik kandidat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Muzahid Akbar Hayat et al., 2021).

Konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pilkada merupakan hajatan politik pada aras lokal yang sangat menentukan arah kemajuan dan keberlangsungan nasib kehidupan rakyat di daerah selama lima tahun kedepan. Namun demikian momen penting Pilkada justru tidak jarang dicerai oleh tingkat partisipasi dan perilaku politik rakyat sangat rendah yang menunjukkan adanya sikap apatis (apolitik) sehingga berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Kondisi ini secara teoretis bisa terjadi karena partisipasi politik masyarakat dipengaruhi

oleh beberapa faktor seperti faktor sosial-ekonomi, kultural, pendidikan dan lain-lain. Dalam kasus masyarakat pesisir, faktor ekonomi bisa menjadi alasan rasional yang menyebabkan masyarakat pesisir cenderung lebih memprioritaskan pekerjaan daripada urusan politik (Juliardi, 2018).

Pendapat di atas diperkuat oleh (Kusnadi, 2017) yang mengatakan bahwa faktor ekonomilah yang menjadi alasan utama mengapa masyarakat pesisir lebih cenderung memprioritaskan pekerjaannya daripada terlibat dalam urusan politik. Disamping itu, faktor pendidikan yang rendah juga dapat menjadi faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di daerah pesisir ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bertepatan dengan waktu mereka untuk melaut. (Sa'ban et al., 2019). Pada kondisi demikian para nelayan lebih memilih melaut untuk mencari nafkah bagi keluarganya daripada harus libur melaut demi ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada.

Konteks penelitian ini, masyarakat pesisir di Pulau Marangkik yang merupakan salah satu pulau terluar di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur menunjukkan indikasi bahwa perilaku politik mereka cenderung apolitis terhadap gelaran Pilkada Lombok Timur 2024. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan perilaku politik masyarakat dalam pemilihan kepala Daerah. Pada titik ini tentu saja perilaku politik antara masyarakat di perkotaan dengan masyarakat di pedesaan sangatlah berbeda, begitu juga dengan masyarakat yang menetap di wilayah pesisir dengan yang menetap di daratan. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana perilaku politik masyarakat pesisir di pulau Marangkik dalam Pemilihan Kepala Daerah Lombok Timur 2024. Karena perilaku politik menjadi salah satu aspek krusial dalam sistem demokrasi, sebab perilaku politik masyarakat berimplikasi pada kualitas demokrasi di aras lokal.

Sudah banyak hasil penelitian yang menjelaskan terkait dengan perilaku politik masyarakat di daerah pesisir di antaranya; *Pertama*, penelitian Juliardi, (2018) berjudul "Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan Sungai Limau dalam pemilu Legislatif tahun 1999". Penelitian ini secara sederhana menjelaskan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan pulau Limau Pada pemilu legislative tahun 1999 secara kuantitas sangat tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi politik pada periode pemilu sebelumnya. Kendati demikian di kalangan masyarakat tingkat menengah ke bawah justru tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Namun hal ini tidak terjadi pada masyarakat nelayan Sungai Limau yang notabene termasuk kelompok masyarakat menengah ke bawah namun justru tingkat partisipasi politiknya sangat tinggi. Namun kelemahan penelitian ini tidak menjelaskan secara detail secara detail faktor-faktor apa yang menyebabkan tingkat partisipasi Masyarakat nelayan di Sungai Limau begitu tinggi.

Kedua, penelitian MIP & Purwaningsih (2020) berjudul faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam kemenangan kotak kosong pada Pemilihan Walikota Makassar 2018". Penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan kotak kosong dalam pemilihan walikota Makassar tahun 2018 karena ketidakpercayaan Masyarakat (untrust) sebagai pemilih kepada calon tunggal yang dianggap sebagai pendatang baru. Kemenangan kotak kosong pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 menunjukkan kecerdasan Masyarakat Makassar dalam berdemokrasi. Disamping itu juga sebagai kritik terhadap partai politik yang hanya mampu mengusung satu pasangan calon dan tidak ada *political will* untuk mencalonkan pasangan calon lain yang dianggap *representative* dan *capable*. Fenomena politik

ini juga menunjukkan adanya pertarungan antara masyarakat sebagai pemilih dengan oligarkhi politik yang kian memprihatinkan.

Ketiga, penelitian Suryana Rahman et al. (2023) berjudul “Perilaku Pemilih Masyarakat Pesisir dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Kelurahan Purirano dan Kelurahan Mata Kota Kendari”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perilaku pemilih Masyarakat pesisir kelurahan Purirano dan Mata dalam pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara berdasarkan pada tiga pertimbangan yaitu pertama, pertimbangan rasional dimana warga memilih calon berdasarkan pada visi misi. Kedua pertimbangan sosiologis yaitu antara calon dengan pemilih memiliki kedekatan karena kesamaan suku. Ketiga pertimbangan psikologis, yaitu dengan melihat bagaimana kiprah atau keberhasilan calon (incumbent) dalam memimpin kepala Daerah pada periode sebelumnya. Namun diantara ketiga pertimbangan tadi mayoritas pemilih lebih memilih calon gubernur berdasarkan pertimbangan rasional dan sosiologis.

Keempat, penelitian Hasimu & Amsir (2020) berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan di Desa Pulo Madu Kabupaten Kepulauan Selayar” penelitian ini menemukan hasil bahwa kendati masyarakat Kepulauan Selayar pada musim pemilu selalu dikhianati oleh para calon anggota legislative (caleg) atau petinggi partai, karena selalu menawarkan janji-janji politiknya yang tidak pernah ditepati. Tetapi warga masyarakat tidak pernah golput justru tetap berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu dengan cara datang ke tempat pemungutan suara (TPS) memberikan hak suaranya. Hal ini karena dipengaruhi tiga factor yaitu; 1) politik uang, 2) berharap dengan pemerintahan yang baru nasib hidupnya semakin lebih baik dan Sejahtera. 3) faktor keluarga.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang lebih banyak memotret antusiasme masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan pemilu legislatif maupun Pilkada dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan Pilkada maupun pemilu legislatif (Pileg). Dalam konteks ini dapat dijelaskan bahwa perilaku politik masyarakat sangat menentukan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilkada. Namun dalam konteks penelitian ini, peneliti ingin memotret perilaku politik Masyarakat pesisir pulau Marangkik pada Pilkada Lombok Timur 2024.

Perlu ditegaskan disini bahwa unit analisis dalam pendekatan tingkah laku adalah individu. Karena itu harus dipahami pula bahwa variabel yang menentukan perilaku politik individu sangatlah kompleks, seperti status sosial, ekonomi, budaya, maupun tingkat pendidikan individu (Noor, 2014). Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, perilaku politik Masyarakat pesisir di pulau Marangkik cenderung apolitis terhadap penyelenggaraan Pilkada Lombok Timur 2024, namun mereka tetap melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih calon Kepala Daerah Lombok Timur lima tahun kedepan. Berdasarkan hal tersebut muncul sebuah pertanyaan faktor apa yang menyebabkan perilaku politik Masyarakat Pesisir di Pulau Marangkik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur cenderung apolitis sementara itu tingkat partisipasi politiknya begitu tinggi dalam pilkada Lombok Timur tahun 2024.

Berkaitan dengan hal ini pertanyaan lanjutan yang penting ditelusuri adalah apakah masyarakat pesisir pulau Marangkik memilih calon Kepala Daerah berdasarkan loyalitas (ideologis), tekanan sosial, pertimbangan rasional atau

emosional? Karena itu penelitian ini bertujuan ingin mengungkap perilaku politik masyarakat pesisir pulau Maringkik pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi atau pertimbangan politik bagi calon Kepala Daerah atau Partai Politik dalam pilkada atau pemilu mendatang sebagai strategi politik dalam meraih simpati dan suara masyarakat di pulau Maringkik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Fadli, 2021). Penelitian kualitatif dipilih karena untuk mendapatkan data secara mendalam terkait dengan perilaku politik masyarakat pesisir dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Pulau Maringkik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan Studi kasus dipilih sebagai pendekatan karena ingin menyelidiki suatu fenomena atau kasus tertentu secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata yang dialami (Yin, 2018). Dalam konteks ini jenis studi kasus yang dipilih adalah studi kasus deskriptif yaitu Mendeskripsikan fenomena tentang kehidupan nyata secara rinci dan sistematis (Merriam, 1998).

Lokasi penelitian ini di Pulau Maringkik di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Lokasi ini dipilih karena masyarakat di pulau ini yang mayoritas matapencahariannya sebagai nelayan memiliki perilaku politik yang apolitis terhadap gelaran Pilkada Lombok Timur namun mereka tetap datang ke Tempat Pemungutasn Suara (TPS) untuk memilih calon Kepala Daerah Lombok Timur tahun 2024. Subyek penelitian ini adalah Masyarakat pulau Maringkik yang memiliki hak pilih pada Pilkada Lombok Timur 2024. Sedangkan Teknik penentuan subyek dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* dipilih untuk mewawancarai informan kunci (*key informan*) yang sudah ditentukan sebelumnya seperti tokoh pemuda dan tokoh Masyarakat. Sedangkan *snowball sampling* dilakukan untuk mewawancarai warga Masyarakat biasa yang mayoritas berprofesi sebagai Nelayan. Sedangkan Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data-data yang di peroleh di lapangan tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga mendapatkan gambaran secara holistik terhadap fakta sosial yang sebenarnya (Fadli, 2021; Sugiyono, 2021). Sedangkan analisis data dilakukan melalui lima tahapan yaitu menyusun dan mengorganisasi data (*compiling and organizing*), mengurai data (*disassembling*), menafsirkan data (*reassembling & interpreting*), menarik kesimpulan (*concluding*), memverifikasi dan memvalidasi temuan (*verifying*) (Yin, 2018).

PEMBAHASAN

Secara teritorial pulau Maringkik merupakan salah satu pulau kecil yang terletak di Kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur. Untuk menuju pulau ini harus menempuh perjalanan dengan menggunakan perahu kecil dari Pantai Tanjung Luar. Luas wilayah Pulau Maringkik sekitar 8 hektare. Pulau Maringkik dibagi menjadi tiga dusun yaitu Maringkik Barat, Maringkik Timur dan Maringkik Selatan. Penduduk Pulau Maringkik pada tahun 2021 berjumlah 2.760 jiwa (BPS 2024). Sedangkan Matapencahariannya utama penduduknya adalah nelayan, Namun ada juga yang berprofesi sebagai tukang bangunan dan pegawai baik honorer maupun ASN. Karena itu masyarakat pulau Maringkik menjadikan hasil laut sebagai sumber utama kehidupan mereka. Sedangkan Sebagian besar istri nelayan

disamping berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus membantu mempersiapkan kebutuhan suaminya untuk melaut. Disamping itu ada juga yang menjadi petani lobster karena satu sisi ekosistem alam laut sangat mendukung dan di sisi lain secara ekonomi prospeknya sangat menjanjikan dibandingkan dengan tetap berprofesi sebagai nelayan. Karena itu sekelompok masyarakat pulau Maringkik mulai beralih profesi dari nelayan menjadi petani lobster.

Masyarakat pesisir adalah kelompok sosial yang hidup dan menggantungkan hidupnya pada ekosistem laut dan pantai, seperti nelayan, pedagang ikan, pengrajin perahu, dan sebagainya. Secara sosiologis, kehidupan mereka umumnya diwarnai oleh ketergantungan pada alam, menjunjung tinggi kebersamaan, solidaritas sosial yang kuat dan struktur sosial yang egaliter. Menurut (Satria, 2015), masyarakat nelayan dapat dikategorisasi menjadi tiga kelompok yaitu *pertama*, sebagai nelayan penuh yakni sebagian besar waktunya dihabiskan untuk aktivitas nelayan. *Kedua*, kelompok nelayan paruh waktu (*part time*) dimana sebagian waktunya digunakan untuk menangkap ikan ke laut. *Ketiga*, Kelompok masyarakat dimana sebagian waktunya di habiskan untuk nelayan dan sisanya digunakan untuk aktivitas selain nelayan. Berdasarkan kategorisasi kelompok nelayan tersebut, maka masyarakat nelayan di Pulau Maringkik dapat dikategorikasikan sebagai nelayan penuh dimana waktunya dihabiskan untuk aktivitas melaut.

Disamping itu, umumnya Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir atau yang berprofesi sebagai nelayan tidak lepas dari berbagai tantangan hidup baik yang bersifat politik, sosial maupun ekonomi. Beberapa tantangan tersebut yaitu 1) Ketidaksetaraan sosial (*social inequality*) dan tekanan ekonomi yang tak berkesudahan (*unfinished*), 2) Keterbatasan dalam mengakses modal, teknologi dan pasar yang mempengaruhi dinamika usaha, 3) Kelemahan dalam memanfaatkan fungsi lembaga sosial yang ada. 4). Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena terbatasnya akses pendidikan, kesehatan dan layanan publik, 5) Degradasi sumber daya lingkungan sekitar pantai atau laut, 6). Kebijakan pemerintah (*political will*) yang belum sepenuhnya menjadikan laut Indonesia sebagai poros maritim sebagai landasan utama pembangunan nasional (Nasution & Hartono, 2017).

Pendapat diatas menemukan relevansinya dengan tantangan dan kondisi sosiologis yang dihadapi Masyarakat Pulau Maringkik baik dari segi ekonomi, sosial dan politik. Karena itu tidak heran setiap momentum gelaran Pilkada Masyarakat Pesisir Pulau Maringkik sering menjadi objek politik dari pasangan calon maupun partai untuk memenangkan kontestasi pemilu maupun pilkada karena salah satu alasannya Sumber Daya Manusianya (SDM) sangat rendah. Sumber Daya Manusia yang rendah pada masyarakat pesisir pulau Maringkik juga berdampak pada pemahaman mereka terhadap politik praktis meskipun terdapat upaya berbagai pihak (Pemerintah Daerah maupun KPU Kabupaten) untuk meningkatkan literasi politik seperti sosialisasi dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kendati tingkat partisipasi mereka dalam pemilu elektoral cukup tinggi dalam memilih calon pemimpin daerah, namun tidak semua warga masyarakat Pesisir pulau Maringkik cukup mengenal sosok calon pemimpin yang mereka pilih.

Sikap Apolitik

Sebagaimana yang terjadi pada Masyarakat pesisir di pulau terluar lainnya, masyarakat yang tinggal di pulau Maringkik juga sering menjadi obyek kontestasi politik (rebutan) dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah (pilkada), pemilu legislatif (pileg) maupun pemilihan Presiden (pilpres). Hal ini wajar karena secara sosial-ekonomi umumnya masyarakat yang tinggal di pulau terluar tergolong miskin dan tingkat pendidikannya rendah sehingga menurut persepsi politisi, masyarakat pesisir mudah di mobilisasi sebagai obyek politik demi kepentingan politik mereka dalam meraup suara. Sebagaimana pada gelaran pilkada-pilkada sebelumnya, masyarakat pesisir pulau Maringkik sering dijadikan sasaran kampanye (obyek politik) karena potensi suara yang begitu besar. Hal ini wajar karena populasi warga yang mendiami pulau Maringkik secara kuantitas cukup signifikan jumlahnya dan merupakan pulau terpadat di kabupaten Lombok Timur.

Tabel. 01
Data Jumlah Pemilih Pilkada Lombok Timur
Kelurahan Pulau Maringkik

DAFTAR PEMILIH	LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Jumlah Pemilih Tetap	779	757	1.536
Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih	657	668	1.325

Sumber: Data KPU Lombok Timur 2024

Kendati tingkat partisipasi masyarakat pulau Maringkik cukup tinggi dalam gelaran pilkada 2024, namun mayoritas masyarakat pulau Maringkik dalam menghadapi pilkada, pileg maupun pilpres lebih memilih bersikap pasif (apolitik). Meskipun para calon dan tim sukses (timses) silih berganti datang berkunjung seraya memberikan janji-janji politik untuk perubahan kehidupan mereka yang lebih baik, namun para warga di pulau ini tidak begitu antusias dan simpati karena hal ini sudah biasa terjadi setiap agenda lima tahun sekali Ketika menjelang pemilu atau Pilkada. Masyarakat pesisir pulau Maringkik menganggap bahwa para calon Bupati atau politisi partai hanya mau berkunjung ke pulau halamannya kalau ada kepentingan politik saja seperti menjelang Pilkada. “Masyarakat disini sadar dan mereka sudah tahu bahwa para tokoh partai atau calon bupati mau berkunjung ke pulau kami kalau mereka mau kampanye saja”. Kata Hasbi (57 th) salah seorang warga Pulau Maringkik. Meski demikian warga pulau Maringkik tetap terbuka menerima siapapun calon atau tim sukses yang datang berkunjung ke pulauanya. Hal ini berbeda dengan Masyarakat yang tinggal di daratan yang justru hiruk pikuk dan reaktif bahkan antar teman, saudara atau tetangga konflik karena berbeda pilihan politik. Mengenai sikap apolitik Masyarakat pulau Maringkk berikut ini pengakuan salah satu warga Bernama Rusdi (38 th).

“Bagi saya ada pemilu tidak ada pemilu sama saja. Kami sebagai warga nelayan yang penting bisa melaut untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun pulau tempat tinggal kami sering didatangi tim sukses dari calon bupati maupun dari partai tetap kami terima karena mereka sebagai tamu kami. Biasanya mereka datang membagi-bagikan kaos,

pasang spanduk dan memberi janji-janji politik tetapi kami anggap hal itu biasa dan wajar saja” (wawancara pada tanggal 25 April 2025).

Pengakuan salah seorang warga pulau Maringkik diatas merupakan wujud nyata dari apatisme politik disebabkan tingkat ketidakpercayaan masyarakat pulau Maringkik terhadap para calon maupun partai sangat tinggi. Ketidakpercayaan masyarakat pulau Maringkik terhadap partai atau para calon kepala daerah bukanlah tanpa alasan. Ketidakpercayaan masyarakat pulau Maringkik dalam dunia politik terutama pilkada karena belajar dari pengalaman pada pilkada sebelumnya. Kendati demikian warga masyarakat Pulau Maringkik tetap berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Mengacu pada penjelasan di atas, sikap apolitis masyarakat pulau Maringkik mengindikasikan bahwa politik (pilkada) bukanlah menjadi prioritas utama dalam kehidupannya. Bagi mereka, politik (pilkada) tidak memiliki keterkaitan signifikan dengan kehidupannya sebagai nelayan. Sebaliknya keterlibatan dalam politik pilkada baik sebagai tim sukses maupun pendukung calon atau partai tertentu justru akan mengorbankan secara sosial dan ekonomi. Meskipun demikian sikap ketidakpercayaan (apolitis) masyarakat terhadap terhadap politik dalam gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) atau politisi partai dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan partisipatif dimasa mendatang khususnya di Pulau Maringkik.

Pilihan Pragmatis dan Emosional

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, meskipun secara sosiologis perilaku politik Masyarakat Pulau Maringkik cenderung apolitis terhadap penyelenggaraan Pilkada Lombok Timur 2024, namun tingkat partisipasi Masyarakat relatif tinggi dalam pemilihan Pilkada Lombok Timur 2024, meskipun tidak semua masyarakat pulau Maringkik mengenal dekat sosok calon pemimpin Daerah Lombok Timur yang akan mereka pilih. Kendati mayoritas mereka berprofesi sebagai nelayan namun sebagian besar dari mereka memiliki kesadaran politik untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara.

Tabel. 02
Hasil perolehan Suara Pilkada Lombok Timur 2024
Kelurahan Pulau Maringkik

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	H. Rumakasih SJ, SH H. Achmad Sukisman Azmy, M.H	167
2	Drs. H. Haerul Warisin, M.Si Ir. Moh. Edwin Wijaya, M.M	462
3	Tanwirul Anhar, S.T H.D Paelori, SE,M.M	257
4	H.M. Syamsul Luthfi H. Abdul Wahid	306
5	H. Suryadi Jaya Purnama, S.T TG. H. L.G. M. Khairul Fatihin, S.Kom.I, M.M	82
Jumlah Seluruh Suara Sah		1.274

Jumlah Suara Tidak Sah	51
Total Seluruh Suara Sah +tidak Sah	1.325

Sumber: Data KPU Lombok Timur 2024

Sebagaimana pada umumnya perilaku politik masyarakat pesisir dimana pilihan politik mereka lebih cenderung didasarkan pada pertimbangan untung-rugi (pragmatis). Mereka mau memilih karena adanya politik uang, atau berkaitan langsung dengan kehidupan mereka sebagai nelayan seperti mendapat sumbangan mesin perahu, jaring (alat tangkap ikan) dan peralatan-peralatan nelayan lainnya dari calon tertentu atau mendapat sumbangan yang sifatnya untuk kepentingan umum seperti membantu pembangunan masjid, membangun jembatan atau jalan, infrastruktur pesisir dan lain-lain. Dengan kata lain, janji politik yang bersifat konkret lebih memungkinkan mempengaruhi keputusan politik mereka untuk memilih calon atau partai. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa preferensi politik Masyarakat pulau Maringkik bukan didasarkan pada factor fanatisme terhadap ideologi atau figur tokoh tertentu tetapi berdasarkan pada pertimbangan pragmatisme (Noor, 2014). Pada titik ini, berbicara tentang ideologi politik pada pemilihan pilkada pada Masyarakat pesisir termasuk masyarakat pulau Maringkik tidak relevan lagi. Hal ini bisa di buktikan dengan pengakuan salah seorang tokoh pemuda Pulau Maringkik bernama Noval (36 tahun). Berikut ini pengakuannya melalui wawancara dibawah ini:

“Umumnya masyarakat Pulau Maringkik dalam menghadapi Pilkada maupun pileg sangat santai dan biasa-biasa saja seperti hari biasanya. Bagi mereka yang penting bisa melaut sehari-hari dan mendapat uang. Urusan Pilkada dan soal pilihan calon mana yang akan dipilih tidak pernah mereka pikirkan. Mereka datang ke TPS dan pilihan mereka terhadap calon Kepala Daerah karena mereka mendapat bantuan peralatan nelayan atau uang. Jadi sangat simpel” (wawancara pada tanggal 25 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa perilaku politik Masyarakat pulau Maringkik sangat pragmatis. Bagi mereka, pilkada bukan dianggap momentum sebagai sebuah perubahan dalam kehidupan mereka yang hidup ditengah pulau. Bagi mereka pergantian pemimpin tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kehidupan mereka dan kemajuan kampung mereka. Mereka tetap menjadi nelayan yang hidup marginal di tengah pulau dengan akses sangat terbatas. Perilaku politik seperti ini sangat umum terjadi pada masyarakat pesisir lainnya. Hal ini tidak lepas dari pengaruh tingkat pendidikan dan status sosial mereka sebagai nelayan yang hidupnya subsisten.

Disamping itu ada alasan lain mengapa mereka menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pilkada meskipun menurut mereka Pilkada tidak berpengaruh signifikan terhadap nasib kehidupan mereka sebagai nelayan yang hidup di tengah pulau dengan segala keterbatasannya. Berikut ini pengakuan salah satu warga maringkik Bernama Saleh (52 tahun) melalui wawancara dibawah ini:

“Saya datang ke TPS waktu pemilihan Pilkada Bupati dan wakil Bupati Lombok Timur 2024 setelah saya pulang melaut pagi hari sekitar pukul 9.30. Selesai pulang melaut saya datang ke TPS dan memilih salah satu pasangan Bupati dan wakil Bupati karena diperintah oleh salah satu saudara atau

kerabat saya yang kebetulan menjadi tim sukses dari pasangan tertentu”. (wawancara pada tanggal 12 Mei 2025).

Berdasarkan pengakuan salah satu warga melalui wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa warga masyarakat pesisir Pulau Maringkik datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena di dasarkan factor emosional yaitu karena adanya hubungan kekerabatan dimana salah satu keluarganya menjadi tim sukses dari salah satu calon. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku politik masyarakat Pulau Maringkik sangat mempengaruhi tingkat partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah di Lombok Timur. Dalam konstruk teori tindakan sosial bahwa perilaku dan partisipasi politik masyarakat pesisir pulau Maringkik pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Timur karena didasarkan pertimbangan afektif yaitu suatu Tindakan individu yang dipengaruhi oleh perasaan atau ekspresi emosional. Tindakan afektif ini bersifat spontan tanpa mempertimbangkan unsur rasionalitas. (Narwoko & Suyanto, 2010).

Ideologi Harmoni

Ideologi harmoni adalah pandangan hidup atau sistem nilai yang menekankan pentingnya hidup rukun, seimbang, dan saling menghargai antarindividu dalam masyarakat maupun antara manusia dan lingkungannya. Dalam konteks sosiologis dan antropologis, ideologi ini sering muncul dalam masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan sosial seperti yang terjadi pada masyarakat yang hidup wilayah pesisir maupun pedesaan. (Koentjaraningrat, 2015). Karena itu tipe masyarakat seperti ini memiliki ciri sosial seperti sistem kekerabatan dan solidaritas sosial sangat kuat. Relasi sosial diantara mereka juga sangat intim (tidak berjarak) serta Kebersamaan dan gotong royong tetap terjaga. Mereka diikat oleh kesamaan identitas agama, etnis, budaya dan pekerjaan,serta hidup senasib sepenangungan. Dalam konteks lokasi penelitian ini, mayoritas masyarakat yang mendiami pulau Maringkik merupakan keturunan dari suku Bugis. Mereka sudah mendiami pulau ini ratusan tahun dan hidup secara turun temurun. Oleh karena itu masyarakat pulau Maringkik sangat kuat menjaga harmoni, dimana sistem kekerabatan dan ikatan sosial diantara mereka sangat kuat. Ikatan sosial dan sistem Kekerabatan ini menjadi modal sosial yang lebih diprioritaskan daripada hanya sekedar urusan politik, berbeda pilihan yang pada gilirannya mengorbankan ikatan sosial dan kekerabatan diantara mereka. Terkait hal ini berikut ini wawanacara dengan tokoh pemerintah Desa bapak Nusapati (45 tahun).

“Masyarakat kami disini di pulau Maringkik memang lebih mengutamakan hubungan persaudaraan dan pertetanggaan daripada ribut apalagi konflik hanya karena sekedar persoalan beda pilihan partai, calon bupati, gubernur, atau presiden dengan tetangga atau saudara. Karena kita hidup di pulau ini senasib seperjuangan. Bagi Masyarakat kami disini, Pilkada, pilpres atau pileg hanya sekedar ritual politik biasa yang tidak perlu diributkan. Walaupun demikian masyarakat saya disini tetap ikut mensukseskan pemilu dengan datang ke TPS untuk mencoblos. Kami sebagai aparat Desa berkewajiban terus mengingatkan dan menghimbau kepada semua warga untuk berbondong-bondong ke TPS. Persoalan siapa yang dipilih itu tergantung hati nurani mereka masing-masing, kami tidak ikut campur

pilihan mereka, yang penting tidak golput itu saja“ (wawancara pada tanggal 25 Mei 2025).

Berdasarkan pendapat dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam kehidupan sosial, masyarakat Pulau Maringkik sangat sejalan dengan ideologi harmoni. Mereka lebih menekankan kebersamaan, kerukunan, solidaritas, dan keseimbangan dengan alam. Ideologi harmoni menjadi fondasi yang menjaga keteraturan sosial sekaligus mendukung keberlangsungan hidup mereka secara kolektif. Mereka lebih memilih hidup rukun, damai dan guyup daripada harus konflik, *cekcok* dengan tetangga dan saudara (segerasi sosial) karena perbedaan pilihan atau ideologi politik yang bersifat fanatik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa solidaritas mekanik Masyarakat pesisir Pulau Maringkik masih sangat kuat sehingga segala bentuk atau aktivitas apapun yang dapat memecah belah persaudaraan harus disingkirkan. Kendati memiliki perbedaan pilihan politik, masyarakat pulau Maringkik tetap menjaga persatuan dan persaudaraan. perbedaan pilihan politik tidak sampai mengakibatkan konflik antar tetangga atau ikatan sosial (*social bond*) mereka menjadi renggang (*segregasi sosial*).

KESIMPULAN

Memperbincangkan masyarakat pesisir apalagi yang hidup di tengah pulau tidak bisa lepas dari persepsi kita tentang jeratan masyarakat oleh matarantai kemiskinan, hidup terbelakang dan pendidikan yang rendah. Hal ini juga berlaku dalam masyarakat pesisir yang hidup di pulau Maringkik kecamatan Keruak kabupaten Lombok timur. Secara sosial ekonomi dan politik mayoritas masyarakat pesisir di pulau Maringkik hidupnya subsisten mengandalkan hasil laut sebagai nelayan dan berpendidikan rendah. Oleh Karena itu masyarakat yang hidup di pulau Maringkik sering menjadi obyek politik bagi calon kepala daerah atau politisi partai demi meraup suara pada momentum pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Lombok Timur tahun 2024, apalagi pulau ini terkenal penduduknya terpadat di wilayah Lombok Timur.

Pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah Lombok Timur tahun 2024 masyarakat pesisir pulau Maringkik bersikap apatis karena bagi mereka momen Pilkada tidak membawa perubahan signifikan bagi kehidupannya yang lebih baik. Kendati banyak calon kepala daerah dan politisi partai datang silih berganti dan selalu memberi janji-janji politik kepada warga pulau Maringkik. Mereka lebih memilih melaut mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Bagi Masyarakat pulau Maringkik Pilkada sama saja dengan hari-hari biasa. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun masyarakat lebih asyik dan antusias membicarakan tentang kehidupannya sebagai nelayan daripada membicarakan politik Pilkada.

Kendati Masyarakat pesisir pulau Maringkik bersikap apatis namun mereka tetapi ikut berpartisipasi dalam gelaran pilkada yaitu datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah. Mereka memilih pasangan calon lebih berdasarkan pertimbangan pragmatis (politik uang atau mendapat sumbangan alat-alat nelayan atau lainnya dari calon) dan emosional (mengikuti pilihan kerabat atau saudara). Bagi masyarakat Pulau Maringkik, mereka lebih mengutamakan kerukunan, persaudaraan dan hidup harmonis daripada harus konflik atau *cekcok* dengan tetangga atau saudara hanya karena berbeda pilihan politik.

REFERENSI

- Adila, S. P., & Putra, E. V. (2020). Perilaku Memilih Masyarakat Desa Dalam Pemilu Legislatif (Studi Kasus) Pemilih Masyarakat Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian ...*, 3(3).
- Arniti, N. K. (2020). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hasimu, H., & Amsir, A. A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan di Pulo Madu Kabupaten Kepulauan Selayar. *Vox Populi*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/vp.v2i2.11975>
- Juliardi, B. (2018). Partisipasi politik Masyarakat Nelayan Sungai Limau Dalam Pemilu Legislatif Tahun 1999. *Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan Dan Kependidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.22202/bakaba.2018.v8i2.3426>
- Koentjaraningrat, K. (2015). Pengantar Ilmu Antropologi (Revised). In *Rineka Cipta*.
- Kusnadi. (2017). Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesiir. *Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional (The Factor of Poverty Causes Traditional Fisherman) Haris*, 3(April).
- Mashuri, A., Putra, I. E., & Montiel, C. (2022). Political Psychology of Southeast Asia. *Journal of Social and Political Psychology*, 10(2). <https://doi.org/10.5964/jspp.10133>
- Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. In *Dados* (Vol. 2nd).
- MIP, I., & Purwaningsih, T. (2020). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DALAM KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2018. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 5(2). <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i2.30297>
- Muzahid Akbar Hayat, Sjaiful Jayadiningrat, Gunawan Wibisono, & Muhammad Iwu lyansyah. (2021). Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(1). <https://doi.org/10.36418/jist.v2i1.61>
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2010). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga. In *Jakarta: Prenada Media Group*.
- Nasution, Z., & Hartono, T. T. (2017). PROFIL SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT NELAYAN PERAIRAN LAUT DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 10(7). <https://doi.org/10.15578/jppi.10.7.2004.47-53>
- Noor, F. (2014). PERILAKU POLITIK PRAGMATIS DALAM KEHIDUPAN POLITIK KONTEMPORER: KAJIAN ATAS MENYURUTNYA PERAN IDEOLOGI POLITIK DI ERA REFORMASI. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 40(1).
- Pusida, R., Agustinus Pati, & Trintje Lambey. (2018). Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Eksekutif*, 1(1).
- Sa'ban, L. . A., Sadat, A., & Nastia. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. *JIP (Jurnal Ilmu*

- Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1).
<https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.29-38>
- Satria, A. (2015). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kulaitatif, dan R&D, dan Penelitian Pendidikan). In *Alfabeta*.
- Surbakti, R. (2018). Memahami Ilmu Politik - Ramlan Surbakti. In *PT Gramedia Widiasarana Indonesia*.
- Suryana rahman, A. irma, Eka Suaib, & Dian Trianita Lestari. (2023). PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT PESISIR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018 KELURAHAN PURIRANO DAN KELURAHAN MATA KOTA KENDARI. *JAPMAS: Jurnal Politik Dan Demokrasi*, 1(2).
<https://doi.org/10.52423/japmas.v1i2.9>
- Sutarna, I. T., Subandi, A. S., & Zitri, I. (2023). Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula: Inisiatif Untuk Integritas Pemilu. *TRANSFORMASI: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*, 3(1).
<https://doi.org/10.31764/transformasi.v3i1.14723>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods (6th ed.)*. Thousand Oaks, CA Sage. Scientific Research Publishing.